

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Sejak konsili Vatikan II, gereja mulai membuka diri terhadap dunia dan perkembangannya. Keterbukaan itu tidak saja bersifat pasif, melainkan aktif dalam bertumbuh dan ada bersama dunia. Konstitusi Pastoral “*Gaudium et Spes*” menandasakan bahwa gereja turut terlibat dalam merasakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang dalam konteks zaman itu khususnya kaum miskin dan menderita. Kehadiran gereja dalam mengalami duka dan kecemasan kaum miskin dan mencerita nyata dalam term “*option for the poor*”. Term ini adalah suatu gambaran tentang sikap gereja terhadap dunia dengan banyaknya struktur yang menciptakan ketidakadilan. Term ini pula muncul sebagai sebagai suatu kelanjutan dari seruan bahwa keselamatan hanya mungkin oleh iman saja. Oleh karena itu, gereja berada pada pihak kaum miskin dan tertindas. Keberadaannya adalah untuk pembebasan, dengan meneladani praktik pembebasan Yesus Kristus.

Gereja sebagai kumpulan orang yang beriman akan Yesus Kristus mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan kaum miskin dan tertindas. Gereja mengembangkan keberpihakan pada kaum miskin, “*option for the poor*” melalui berbagai macam cara dan refleksi. Pada tataran aksi, gereja banyak bergerak di tingkat keuskupan, contohnya: Lembaga Caritas, JPIC (*justice, peace and integrity of creation*) dan berbagai macam kelompok lain. Keberadaan kelompok ini didasari semangat pembebasan bagi masyarakat yang hidup dalam tekanan dan kemiskinan. Oleh karena itu dalam ranah teologi, teologi pembebasan sangat penting sebagai acuan refleksi dalam membebaskan masyarakat dari penindasan dan kemiskinan.

Menghadapi realitas kemiskinan yang dialami umat Kesukupan Ruteng, Gereja dituntut untuk bekerja lebih keras dan berjuang bersama umat untuk memberantas kemiskinan yang dialami umatnya. Pilihan membebaskan kaum miskin merupakan bentuk partisipasi Gereja dalam misi Yesus. Gereja harus berani menyapa umatnya yang miskin dan berjuang membebaskan kaum miskin, agar kaum miskin sungguh merasakan kehadiran Kerajaan Allah yang diwartakan Gereja itu. Gereja juga harus mendahulukan kaum miskin dalam karya pewartaannya. Hal ini tidak

berarti bahwa orang kaya tidak mendapat perhatian dari Gereja, tetapi pilihan mendahulukan kaum miskin merupakan bentuk solidaritas Gereja terhadap mereka yang terpinggirkan dan miskin agar mereka memiliki martabat yang setara dengan yang lainnya.

Sinode III Keuskupan Ruteng merupakan langkah baru bagi Gereja Keuskupan Ruteng untuk mengentas kemiskinan di Keuskupan Ruteng. Sinode III Keuskupan Ruteng memiliki perhatian yang serius terhadap tema kemiskinan. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam bidang diakonia. Sikap Gereja Keuskupan Ruteng melalui sinode sangat jelas dengan beberapa hasil keputusan sinode. Poin pertama yang menjadi sikap Gereja Keuskupan Ruteng adalah pelayanan terutama terarah kepada orang-orang miskin menderita, yang kurang beruntung, sebab dalam diri merekalah tampak wajah Yesus yang menjerit memohon uluran tangan kasih kita. Poin kedua, dalam aksinya, lebih daripada tindakan karitatif, pelayanan sosial Gereja Keuskupan Ruteng harus bercorak transformatif. Poin ketiga, Gereja Keuskupan Ruteng mesti memperjuangkan kehidupan sosial yang ditata dengan prinsip personalitas, kesejahteraan umum, solidaritas, dan subsidiaritas. Sikap Gereja Keuskupan Ruteng melalui sinode III ini merupakan bentuk keprihatinan dan sekaligus usaha membebaskan kaum miskin dari kemiskinan, sebab kemiskinan mewarnai kehidupan umat Keuskupan Ruteng. Gereja akan betul-betul mengakar di wilayah Keuskupan Ruteng hanya bila ia sanggup menerjemahkan karya pewartaannya bagi transformasi sosial, membawa kaum miskin keluar dari kemiskinannya.

5.2. SARAN

5.2.1. Bagi Agen Pastoral

Agen pastoral menjadi aktor utama dalam menjalankan setiap program yang telah dicanangkan bersama di keuskupan. Tulisan ini memuat begitu banyak hal berkaitan dengan realitas kemiskinan dan kebijakan pastoral Keuskupan Ruteng yang tertuang dalam Dokumen Sinode III 2013-2015. Karena itu semoga melalui tulisan ini setiap agen pastoral lebih mengerti tentang arah kebijakan pastoral keuskupan Ruteng terkait pengentasan kemiskinan, lebih jeli melihat realitas pastoral dalam hal ini kemiskinan sehingga kemudian bisa mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang dialami umat Allah ditempat di mana agen pastoral bertugas.

5.2.2. Bagi Umat Allah

Berhadapan dengan relitas penderitaan akibat kemiskinan, keberadaan sesama yang menyelamatkan menjadi mutlak. Sebagai satu tubuh, sebagai umat Allah kita diharapkan untuk selalu berbelas rasa menyelamatkan sesama yang menderita. Hasil Sinode III Keuskupan Ruteng dan perwujudan segala programnya tidak akan berjalan dengan baik jika sebagai umat kita tidak turut terlibat, memberi diri untuk menyelamatkan sesama. Sesama sesama umat Allah kita diharapkan untuk selalu peka terhadap situasi yang di alami orang lain dan dengan cara kita masing-masing memberi diri untuk membantu sesama.

5.2.3. Bagi Gereja Keuskupan Ruteng

Realitas kemiskinan dan penderitaan akibat kemiskinan yang dialami umat Keuskupan Ruteng merupakan realitas yang tak terelakan lagi. Sinode III Keuskupan Ruteng merupakan angin segar bagi keberpihakan gereja dalam rangka membebaskan mereka yang menderita dari belenggu penderitaan mereka. Semoga semua ide yang tertuang dalam Sinode III Keuskupan Ruteng, dapat diwujudkan nyatakan dalam seluruh program-program pastoral gereja, sehingga masalah kemiskinan dapat segera terselesaikan.

5.2.4. Bagi Pemerintah

Pemerintah adalah pembuat kebijakan dalam ruang lingkup daerah tertentu. Pemerintah harus bisa mengeluarkan regulasi dan menjalankan fungsi control dan pengawasan yang baik terhadap masyarakat dan seluruh aspek kehidupannya. Realitas kemiskinan di Keuskupan Ruteng harus juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Karena itu pihak pemerintah kabupaten diharapkan bisa bekerjasama dengan pihak Keuskupan Ruteng agar masalah kemiskinan dapat segera terselesaikan.